

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua negara tanpa terkecuali negara berkembang maupun negara maju memiliki tujuan yang pada dasarnya sama yaitu berusaha melaksanakan pembangunan dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Kegiatan pembangunan merupakan suatu fenomena yang tidak pernah habis dibahas dalam rangka keberlangsungan hidup manusia. Fenomena tersebut melekat sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang kerap kali mengalami perubahan menurut berbagai dimensi yang ada.

Setiap konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan dan pembangunan, disini dapat diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan sebelumnya. Setiap bangsa dan negara di dunia tentu akan mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Untuk melakukan perubahan maka setiap negara akan berusaha menata pembangunan negaranya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang telah direncanakan.

Hasilnya tidak sedikit dari negara-negara yang berusaha menerapkan model-model pembangunan tersebut berhasil dan tidak sedikit pula dari negara-negara tersebut yang gagal dalam pencapaiannya. Hal ini tidak terlepas dari model paradigma pembangunan dari suatu negara, yang mayoritas lebih memfokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita semata. Sementara perihal mengenai sosial ekonomi masyarakat justru terabaikan.

Pergeseran-pergeseran paradikma pembangunan tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang ada saat ini belum banyak memberikan perhatian pada pembangunan manusia. Padahal salah satu aspek terpenting sebagai pemicu dalam pembangunan ekonomi suatu negara yaitu terletak dari kualitas sumbu daya manusia setiap negara.

Konsep pembangunan manusia itu sendiri, mempunyai cakupan yang lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional, dimana pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk, baik secara fisik maupun secara mental. Peningkatan kualitas hidup penduduk tersebut mengandung makna yaitu sebagai peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan konsep Islam tentang negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana adanya penekanan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu investasi modal terpenting dalam perekonomian suatu negara. Dalam hal ini negara mempunyai tanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari tingkat kebutuhan primer dan sekunder masyarakat itu sendiri.

Menurut Oluwatobi dan Ogunrinola (2011) bahwa “modal manusia telah diakui secara global, sebagai salah satu faktor utama yang bertanggung jawab terhadap kekayaan bangsa”. Kualitas modal manusia yang baik akan mengakibatkan semakin maju dan berkembang pula keadaan negara tersebut, begitu pula sebaliknya semakin rendahnya kualitas modal manusia, maka semakin lambat pula perkembangan negara tersebut. Jika demikian berarti, tinggi

rendahnya kualitas pembangunan manusia suatu negara dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemajuan yang telah dicapai oleh suatu Negara, oleh karena itu, setiap negara sebaiknya menempatkan pembangunan manusia dibaris terdepan.

Uraian mengenai pentingnya peranan modal manusia sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi suatu negara, dikemukakan pula di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yaitu mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya pada aspek kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan) akan tetapi termasuk juga kebutuhan sekunder (keamanan, pendidikan, dan kesehatan). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Mujadalah [58] :11 yaitu :



“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu : “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan : “Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Lebih lanjut dikemukakan pula dirawatkan pula oleh Abdullah bin Masud ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

قَيْسُ إِسْمَاعِيلَ وَكَيْعُ شَيْبَةَ
قَيْسُ إِسْمَاعِيلَ قَيْسُ إِسْمَاعِيلَ يَفُولًا
هَلَكْتَهُ فَسْطَهُ اثْنَيْنِ عَلَيْهِ
نُمَيْرَ

وَيُعَلِّمُهَا بِهَا يَقْضِي فَهُوَ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Isma'il dari Qais ia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata; -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami bapakku dan Muhammad bin Bisyr keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Qais ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh hasad (dengki) kecuali pada dua hal. (Pertama) kepada seorang yang dikaruniakan Allah harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran. (Dan yang kedua) kepada seorang laki-laki yang diberi Allah hikmah (ilmu), hingga ia memberi keputusan dengannya dan juga mengajarkannya."(Muslim : 1325).

Selain pentingnya pendidikan sebagai salah satu faktor dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dikemukakan pula dalam beberapa hadist mengenai pentingnya kesehatan sebagai salah satu modal dalam mendukung kualitas sumber daya manusia, yaitu :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (اللفظ)

Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati (jantung). (HR al-Bukhari dan Muslim)

Pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). Sejalan dengan perkembangan pendekatan pembangunan manusia tersebut, maka pada tahun 1990, *United Nations Development Program* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator baru yang menggabungkan faktor ekonomi dan non-ekonomi yang mendefinisikan kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar GDP yaitu yang dinamakan dengan *Human Development Index* (HDI) atau yang sering disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini meringkas tiga

variabel kesejahteraan dalam sebuah indeks komposit tunggal. Variabel-variabel tersebut antara lain : umur panjang serta menjalani hidup sehat atau diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan diukur dengan tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa atau Angka Melek Huruf (AMH) dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dengan paritas daya beli/PPP, penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan antara penghasilan dan kesejahteraan.

Pembangunan manusia yang diukur dengan IPM telah dijadikan dasar untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara, oleh karena itu konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini telah menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia atas negara-negara dalam 4 kategori yaitu; kelompok dengan IPM tinggi dengan nilai IPM sebesar 0,784 sampai 1, kelompok dengan IPM menengah dengan nilai IPM sebesar 0,669 sampai 0,784, kelompok dengan IPM menengah bawah dengan nilai IPM 0,470 sampai 0,669, serta kelompok IPM rendah yang memiliki IPM 0,469 sampai 0.

Menurut laporan UNDP bahwa nilai-nilai HDI dapat diklasifikasi atas dua kelompok yaitu: negara tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan negara yang tidak tergabung ke dalam kelompok OKI. Organisasi Kerjasama Islam yang sebelumnya bernama Organisasi Konferensi Islam yang didirikan berdasarkan keputusan KTT bersejarah yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada tanggal 12 Rajab 1389 Hijrah (25 September 1969) dengan

beranggotakan 57 negara yang tersebar di empat benua, yaitu organisasi antar negara Islam untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia Islam dalam semangat mempromosikan perdamaian internasional dan harmoni diantara berbagai masyarakat dunia.

Organisasi Kerjasama Islam bertujuan untuk : (1) meningkatkan dan memantapkan ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara negara-negara anggota; (2) Menjaga dan melindungi kepentingan umum dan mendukung penyebab yang sah dari negara-negara anggota dan mengkoordinasikan dan menyatukan upaya negara-negara anggota dalam pandangan tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam pada khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya; (3) Menghormati hak penentuan nasib sendiri dan non - campur tangan dalam urusan dalam negeri dan untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah setiap Negara Anggota ; (4) Memastikan partisipasi aktif dari negara-negara anggota di bidang politik , ekonomi dan sosial proses pengambilan keputusan global untuk mengamankan kepentingan bersama mereka ; (5) Menegaskan kembali dukungan untuk hak-hak masyarakat yang diatur dalam Piagam PBB dan hukum internasional ; (6) Memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan intra - Islam ; dalam rangka mencapai integrasi ekonomi yang mengarah kepembentukan Pasar Bersama Islam ; (7) Mengerahkan upaya untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan dan komprehensif dan kesejahteraan ekonomi di Negara-negara Anggota ; (8) Melindungi dan membela citra Islam yang sebenarnya , untuk memerangi pencemaran nama baik Islam dan mendorong dialog antar peradaban dan agama ; (9) Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong penelitian dan kerja sama antar negara-negara anggota di bidang ini (*OIC*, 2014).

Dalam rangka mewujudkan beberapa tujuan tersebut, maka setiap negara anggota harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip, yaitu : (a) Semua negara anggota berkomitmen untuk tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; (b) Negara-negara Anggota yang berdaulat, mandiri dan setara dalam hak dan kewajiban; (c) Semua Negara Anggota wajib menyelesaikan perselisihan mereka melalui cara-cara damai dan menahan diri dari penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan dalam hubungan mereka; (d) Semua negara anggota berjanji untuk menghormati kedaulatan nasional, kemerdekaan dan integritas wilayah negara anggota lainnya dan harus menahan diri dari mencampuri urusan internal orang lain; (e) Negara-negara Anggota wajib menegakkan dan memajukan, pada tingkat nasional dan internasional, pemerintahan yang baik, demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan aturan hukum (*OIC*, 2014).

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia yang telah dicapai oleh negara OKI dan bukan negara OKI selama periode 2009-2011 menurut versi UNDP dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Negara OKI dan Non OKI Periode 2009-2011

| Negara OKI | Tahun | | | Negara Non OKI | Tahun | | |
|------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Malaysia | 0,758 | 0,763 | 0,766 | Austria | 0,934 | 0,935 | 0,938 |
| Iran | 0,723 | 0,740 | 0,742 | Singapore | 0,841 | 0,864 | 0,866 |
| Azerbaijan | 0,71 | 0,713 | 0,7 | Belarus | 0,780 | 0,785 | 0,789 |
| Guyana | 0,624 | 0,629 | 0,633 | Peru | 0,724 | 0,733 | 0,738 |
| Indonesia | 0,611 | 0,62 | 0,624 | Saint Lucia | 0,720 | 0,723 | 0,724 |
| Tajikistan | 0,576 | 0,580 | 0,607 | Armenia | 0,693 | 0,695 | 0,716 |
| Kirgiztan | 0,591 | 0,594 | 0,598 | Thailand | 0,684 | 0,654 | 0,682 |
| Pakistan | 0,508 | 0,512 | 0,513 | Timor Leste | 0,497 | 0,502 | 0,495 |
| Cameroon | 0,482 | 0,488 | 0,492 | Sri Langka | 0,653 | 0,658 | 0,691 |
| Togo | 0,448 | 0,452 | 0,455 | Bolivia | 0,663 | 0,668 | 0,671 |
| Uganda | 0,445 | 0,450 | 0,454 | Moldova | 0,645 | 0,652 | 0,657 |
| Gambia | 0,432 | 0,437 | 0,440 | India | 0,540 | 0,547 | 0,551 |
| Chad | 0,331 | 0,336 | 0,445 | Burundi | 0,340 | 0,348 | 0,352 |
| Mali | 0,337 | 0,334 | 0,347 | Sierra Leone | 0,329 | 0,334 | 0,336 |
| Guinea | 0,341 | 0,342 | 0,344 | | | | |
| Niger | 0,297 | 0,298 | 0,289 | | | | |

Sumber Data : UNDP, 2013

Berdasarkan hasil laporan UNDP seperti terlihat dalam Tabel 1.1, bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang diperoleh negara Non OKI secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan nilai IPM yang telah dicapai oleh negara OKI. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai IPM negara OKI yang tertinggi adalah Malaysia dengan skor sebesar 0.766 pada tahun 2011, dan nilai IPM terendah ditempati oleh Niger dengan skor sebesar 0.298 tahun 2011. Sebaliknya nilai IPM negara Non OKI menunjukkan angka yang cukup berbeda dengan beberapa negara OKI, dimana negara Austria

mencapai nilai IPM tertinggi dengan skor sebesar 0.938 tahun 2011, dan nilai IPM terendah ditempati oleh Sierra Leone dengan skor sebesar 0.336 tahun 2011.

Apabila mengacu pada peringkat kinerja pembangunan manusia yang telah dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa negara OKI memiliki skor IPM (HDI) berada dalam kategori menengah atas sebanyak tiga negara (Malaysia, Iran, Azerbaijan), dan IPM (HDI) dengan kategori menengah bawah sebanyak 6 negara (Guyana, Indonesia, Tajikistan, Kirgiztan, Pakistan, Cameroon) serta kategori IPM terendah sebanyak 7 negara dengan nilai skor IPM antara 0-0.470. Berbeda pula dengan negara Non OKI, dimana nilai IPM yang berkategori tinggi sebanyak 3 negara (Austria, Singapore, Balarus) dengan skor di atas 0,784-1, dan IPM tergolong menengah atas sebanyak 6 negara, menengah bawah sebanyak 3 negara dan kelompok IPM (HDI) terendah hanya 2 negara, yaitu Burundi dan Sierra Leone.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diperoleh gambaran bahwa negara Non OKI lebih baik perhatiannya terhadap pembangunan manusia dibandingkan dengan negara OKI. Hal ini sejalan dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh Tika (2008 : 22) bahwa, umat Islam masih kalah serius dibandingkan umat non muslim, dikarenakan tidak hanya pada tataran institusional negara, melainkan juga pada tingkat kesadaran masyarakat muslim. Selanjutnya dikemukakan bahwa, adanya kondisi dimana negara Non OKI lebih baik dibandingkan negara OKI, disebabkan karena potensi ekonomi seperti Sumber Daya Alama (SDA) yang dimiliki oleh negara OKI tidak mampu di manfaatkan secara baik, bahkan

dapat dikatakan secara ekonomi umat Islam hanya mampu menguasai sumber-sumber ekonomi sebesar 20%.

Tinggi rendahnya nilai IPM yang dicapai oleh setiap negara tentu tidak terlepas dari peran pemerintah, khususnya dalam kebijakan fiskal yang berkaitan dengan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Wolfson dalam Suparmoko bahwa, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan (Lilik, 2008).

Besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar alokasi anggaran pemerintah (*public*) yang dikeluarkan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Semakin besar alokasi anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk meningkatkan komponen-komponen pembangunan manusia, maka akan semakin meningkat pula pembangunan manusia pada suatu negara, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah mempunyai keterkaitan terhadap peningkatan IPM suatu Negara. Sebagaimana yang terlihat pada tabel 1.2 yang menunjukkan data besarnya pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam kaitannya dengan tingkat pertumbuhan IPM yang telah dicapai dalam kurung waktu dua tahun.

Berdasarkan informasi Tabel 1.2 dan Tabel 1.1 nampak bahwa, tingkat pertumbuhan IPM dan pengeluaran pemerintah dalam kurung waktu tertentu, baik negara OKI maupun Non OKI, kondisinya sering kali bertolak belakang. Ketika

kondisi persentase pengeluaran pemerintah disektor pendidikan maupun pengeluaran kesehatan mengalami penurunan, justru tingkat pertumbuhan IPM cenderung mengalami kenaikan, dan ketika persentase pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan maupun pengeluaran kesehatan mengalami peningkatan, justru tingkat pertumbuhan IPM cenderung mengalami penurunan di beberapa negara. Hal ini menunjukkan adanya kondisi yang tidak sejalan antara pengeluaran publik pemerintah yang ditunjukkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu dilihat dari tingkat pertumbuhan antara IPM dengan pengeluaran pemerintah relatif sangat terbatas.

Tabel. 1.2.
Persentase Pertumbuhan Alokasi Anggaran Pemerintah
di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Negara OKI dan Non OKI
Periode 2010-2011

| Anggaran Belanja Pendidikan | | | | Anggaran Belanja Kesehatan | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Negara OKI | Tahun 10/11 | Negara Non OKI | Tahun 10/11 | Negara OKI | Tahun 10/11 | Negara Non OKI | Tahun 10/11 |
| Malaysia | -0,01 | Singapore | 0,05 | Malaysia | -0,21 | Singapore | -0,01 |
| Iran | -0,06 | Bolivia | -0,21 | Iran | -0,01 | Bolivia | 0,065 |
| Mali | 0,10 | Moldova | -0,02 | Mali | -0,05 | Moldova | -0,004 |
| Guinea | 0,19 | Burundi | -0,04 | Guinea | -0,18 | Burundi | -0,07 |
| Gambia | -0,16 | Thailand | 0,24 | Gambia | -0,03 | Thailand | 0,0007 |
| Indonesia | -0,13 | Belarus | 0,08 | Indonesia | -0,05 | Belarus | -0,0007 |
| Kirgiztan | -0,15 | Peru | 0,05 | Kirgiztan | 0,00 | Peru | -0,002 |
| Cameroon | -0,09 | Sierra L | -0,01 | Cameroon | 0,04 | Sierra L | 0,14 |
| Niger | 0,22 | Armenia | 0,02 | Niger | 0,10 | Armenia | -0,13 |
| Uganda | 0,13 | Saint L | 0,08 | Uganda | 0,12 | Saint Lucia | -0,14 |
| Togo | 0,03 | Timor L | -0,44 | Togo | 0,12 | Timor L | -0,04 |
| Tajikistan | -0,07 | Austria | 0,00 | Tajikistan | 0,09 | Austria | -0,008 |
| Pakistan | 0,02 | Sri Langka | 0,10 | Pakistan | -0,04 | Sri Langka | -0,02 |
| Chad | 0,14 | India | 0,05 | Chad | 0,07 | India | 0,09 |
| Guyana | -0,23 | - | - | Guyana | -0,005 | - | - |
| Azerbaijan | -0,22 | - | - | Azerbaijan | -0,02 | - | - |

Sumber Data : Laporan World Bank, 2014

Besarnya peran pemerintah negara OKI dan Non OKI dalam menunjang pembangunan manusia dapat dilihat dari besarnya alokasi dana pembangunan

yang dikeluarkan untuk memperbaiki tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, seperti nampak dalam Table 1.2. Dalam data tersebut terlihat bahwa, besarnya pengeluaran pemerintah negara OKI dan Non OKI dibidang pendidikan dan kesehatan dapat mempengaruhi besar kecilnya tingkat IPM yang dapat dicapai pada periode tertentu. Kondisi tersebut sekaligus dapat memberi gambaran bahwa untuk meningkatkan IPM suatu negara maka dibutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar guna membiayai kegiatan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan. Besarnya tingkat IPM yang dicapai oleh suatu negara dapat dijadikan indikator untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Selain itu, tingkat IPM yang dicapai oleh suatu negara dapat digunakan untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996).

Bertitik tolak pada uraian tersebut maka dapat dimaknai bahwa, peran pemerintah sangat dominan dalam mendorong peningkatan *human development* terutama berkaitan dengan penyediaan anggaran untuk pendidikan maupun kesehatan. Adanya penyediaan anggaran ini, bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk menempuh jalur pendidikan, menjadi dapat menempuh jalur pendidikan sehingga dapat menamatkan tingkat buta huruf. Serta dengan adanya penyediaan anggaran kesehatan, masyarakat juga dapat menikmati fasilitas kesehatan yang layak dengan gratis, serta dengan adanya bantuan anggaran tersebut pula, kondisi hidup layak masyarakat menjadi meningkat, disebabkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekunder masyarakat yaitu dari tingkat pendidikan maupun kesehatan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan Javar, Abbasian dan Sahar (2002) bahwa, terdapat korelasi positif antara pengeluaran kesehatan pemerintah terhadap IPM. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa dengan adanya korelasi positif, menunjukkan besarnya peran pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur berdasarkan IPM atau dalam artian dengan adanya peningkatan dan adanya alokasi pengeluaran pemerintah maka akan menyebabkan peningkatan kualitas IPM yang semakin baik pula dalam suatu negara. Sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah pada pengembangan sumber daya manusia diharapkan berujung pada peningkatan output perkapita dalam suatu masyarakat.

Penelitian serupa juga dikemukakan oleh Adi, Waridin, dan Johana (2011) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2008 di 35 Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di sektor public tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara simultan pengeluaran pemerintah dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dapat mempengaruhi kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Analisis Pengeluaran Pemerintah Disektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara OKI dan Non OKI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara OKI dan Non OKI?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : “Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara OKI dan Non OKI”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap berbagai pihak, sebagai berikut :

- a. Pemerintah, sebagai dukungan empirik mengenai pentingnya pemerintah memberikan perhatian pada permasalahan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dan pembangunan manusia.
- b. Masyarakat, sebagai sumber informasi serta tambahan ilmu khususnya dalam ilmu ekonomi Islam, mengenai peran pemerintah pada sisi pengeluaran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Bagi peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.

- d. Bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam rangka lebih mendalami dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi melalui sisi pengeluaran pemerintah untuk sector pendidikan dan kesehatan serta pengaruhnya terhadap pembangunan manusia.

